

# Upaya Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Mencapai Target *Minimum Essential Force* Pertahanan Negara Tahun 2020-2021

Teddy Putra Ar Rasyid<sup>1</sup>, Wishnu Mahendra Wiswayana<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup> Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Brawijaya  
(teddyputra.ar@gmail.com, wishnu.mahendra@ub.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan upaya memperkuat postur pertahanan serta pembangunan terhadap unsur-unsur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), antara lain; sumber daya manusia; materiil/alutsista, institusi dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interelasi yang terbentuk dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat berkontribusi bagi upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Kerangka kerja sama pertahanan kedua negara menekankan agenda membangun kapabilitas (*capacity building*) dan agenda membangun kepercayaan (*trust building*). Indonesia mengedepankan diplomasi pertahanan guna menyelaraskan kepentingan dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan. Esensi diplomasi pertahanan yang terdapat pada agendakerja sama berupa forum dialog, program pendidikan dan pelatihan bersama mendorong tindak lanjut pengadaan dan pembelian sejumlah alutsista dari Amerika Serikat yang diperuntukkan bagi penguatan postur pertahanan Indonesia.

**Kata kunci:** *Minimum Essential Force*, Kerja sama, Diplomasi pertahanan, Alutsista

## Pendahuluan

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan, Indonesia berkepentingan untuk membangun sistem pertahanan yang kuat dan terpadu. Selain untuk kepentingan menjaga kedaulatan dan mempertahankan diri, peningkatan kapabilitas pertahanan juga penting bagi Indonesia yang berupaya memainkan peran sentral untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara stabilitas keamanan. Mengingat kondisi dinamika keamanan kawasan yang kompleks, Indonesia membutuhkan posisi kuat

untuk bisa memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, pertahanan nasional dihadapkan dengan peluang dan tantangan strategis yang berpengaruh terhadap postur pertahanan Indonesia. Area strategis yang ditunjukkan oleh negara-negara di kawasan Asia-Pasifik meliputi perkembangan dalam ranah ekonomi, politik, dan militer (Kementerian Pertahanan, 2015).

Pemerintah RI menentukan penyelarasan kekuatan pokok minimum

atau *Minimum Essential Force* (MEF) yang telah dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 (Fitri & Sanur, 2019). Spesifikasi kebijakan tentang penyelarasan MEF diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 dan kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pertahanan No. 39 Tahun 2015. Pembangunan MEF didasarkan pada pengukuran terhadap potensi ancaman (*threat based design*), kemampuan postur pertahanan (*capability based defence*), anggaran/kemampuan ekonomi negara, dan perwujudan saling percaya melalui *confidence building measures* (CBM) dengan negara sahabat (Kementerian Pertahanan, 2012).

Kebijakan MEF mulai dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang terbagi menjadi tiga tahapan atau fase, yakni Tahap I 2010-2014, Tahap II 2015-2019, dan Tahap III 2020-2024 (Zahara & Arjun Rizky, 2020). Indonesia melaksanakan kerja sama pertahanan dengan negara mitrasebagai salah satu upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan dengan melakukan pembangunan terhadap unsur-unsur MEF, yakni: sumber daya manusia (SDM), materiil/alutsista; institusi; dan anggaran. Sebagai negara mitra pertahanan yang memiliki industri pertahanan dan produksi alutsista yang mapan, Amerika Serikat menjadi sasaran

diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas sistem pertahanan dan modernisasi alutsista dalam negeri. Kerja sama pertahanan dapat dicapai dengan membuka peluang pengadaan alutsista dan bantuan militer luar negeri melalui kerja sama strategis yang mengedepankan upaya membangun kepercayaan (*trust building*) dan membangun kapabilitas pertahanan (*capacity building*).

Kerja sama strategis pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat menunjukkan adanya kesamaan kepentingan di antara kedua negara. Amerika Serikat diposisikan sebagai mitra strategis dalam penguatan institusi, kemampuan operasional, kualitas SDM, serta modernisasi alutsista. Kerangka kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam "*Framework Arrangement on Cooperative Activities in the field of Defence between Ministry of Defence of the Republic Indonesia and Department of Defense of the United States of America*" yang ditandatangani pada tahun 2010, meliputi area kerja sama dialog dan konsultasi serta peningkatan kapabilitas pertahanan baik peralatan alutsista maupun kemampuan personel militer (Kementerian Pertahanan, 2015). Melalui kerangka kerja sama pertahanan yang membawahi sejumlah sektor, maka Indonesia tidak hanya mengupayakan pembangunan MEF

secara fisik dengan mendatangkan alutsista saja, melainkan juga mengupayakan pembangunan aspek non-fisik seperti pengembangan kemampuan personel atau SDM, penyatuan visi dan misi, serta penguatan institusi yang merupakan bagian integral dari kapabilitas pertahanan. Kerja sama juga menekankan esensi diplomasi pertahanan sebagai sarana untuk penyelarasan kepentingan terkait pertahanan dan keamanan.

Penelitian ini berfokus pada upaya kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat yang berkontribusi dalam peningkatan kapabilitas pertahanan negara sesuai ketentuan MEF di sepanjang tahun 2020-2021. Secara khusus penelitian ini merumuskan permasalahan yakni: Bagaimana upaya kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam rangka meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional sesuai ketentuan MEF pada tahun 2020-2021? Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menjelaskan upaya Indonesia dalam mengupayakan pembangunan MEF aspek fisik maupun non-fisik yang dilakukan melalui kerja sama dengan Amerika Serikat.

### **Metode Penelitian**

Kerangka konseptual yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah konsep *Military*

*Statecraft* yang pada dasarnya membahas diskursus tentang peran militer dalam menciptakan keadaan dan lingkungan keamanan yang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Pada arti sempit, *Military Statecraft* didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer oleh negara untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri (Wolfley, 2019). Konsep ini memberikan perspektif luas dalam memandang diplomasi pertahanan yang tidak hanya sebatas identifikasi terhadap sejumlah aktivitas atau agenda kooperatif saja, melainkan menghadirkan logika strategi penyelarasan kepentingan dan penilaian tantangan yang melatar-belakangi kerja sama.

Terdapat tiga (3) konsepsi jenis *power* yang melandasi praktik *Military Statecraft* sebagai pendekatan bagi diplomasi pertahanan (Winger, 2014), antara lain sebagai berikut:

- a. *Hard power/coercion power*, yakni menekankan mekanisme hubungan pertahanan melalui tindakan koersif berupa diplomasi koersif dan penggunaan kekuatan bersenjata.
- b. *Economic power/incentive power*, yakni menekankan mekanisme hubungan melalui keberadaan insentif berupa jaminan keamanan dan alutsista sesuai dengan daya tawar dan kemampuan ekonomi negara.

- c. *Soft power/co-optive power*, yakni menekankan mekanisme hubungan yang didasarkan pada kepentingan bersama untuk melakukan sejumlah tindakan kooperatif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, sejumlah variabel yang diturunkan dari konsep *Military Statecraft* akan dianalisis secara naratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi pustaka. Mengingat data yang dikumpulkan berasal dari berbagai macam sumber, maka teknik analisis data kualitatif menerapkan alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahyar et al., 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### ***Coercion Military Statecraft* dalam Hubungan Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Mengingat hubungan di bidang pertahanan dan keamanan mengandung dinamika kompleks serta tujuan politik berdasarkan kepentingan nasional, praktik *Military Statecraft* yang belandaskan *hard power* memberikan gambaran bahwa hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat tidak terlepas dari potensi tindakan koersif yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama. Pembahasan potensi tersebut mengacu

pada penilaian terhadap dua indikator, yaitu instrumen diplomasi koersif dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Diplomasi koersif menjadi pendekatan alternatif yang dinilai lebih rasional dibandingkan penggunaan kekuatan bersenjata secara tradisional. Diplomasi koersif diartikan sebagai tindakan koersif bersifat non-kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain untuk mengikuti atau patuh terhadap kebijakan yang dimilikinya (Wolfley, 2021). Dalam hal ini, negara mengeksploitasi potensi kekuatannya untuk tujuan koersif dengan mengedepankan sisi diplomasi dari kekuatan militer, salah satunya adalah melalui mekanisme ancaman sanksi (Crystal, 2015).

Bagi Amerika Serikat, Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) yang ditetapkan Kongres pada tahun 2017 menjadi instrumen diplomasi koersif bagi negara-negara mitra pertahanan AS yang juga memiliki hubungan dengan negara yang dilabeli sebagai musuh oleh Amerika Serikat (Wezeman, 2019). Pada Desember 2021, Indonesia secara resmi membatalkan rencana pembelian pesawat Rusia Sukhoi Su-35 dengan mengumumkan pesawat F-15 sebagai alternatif baru. Keputusan akhir tersebut diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar

Prasetyo melalui keterangan resminya dengan mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi berkepentingan membeli pesawat Sukhoi (Saballa,2021).

Keberadaan sanksi CAATSA di satu sisi berperan sebagai daya tekan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain, kedaulatan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapabilitas pertahanan tidak memposisikan ancaman sanksi CAATSA sebagai alat koersif yang mempengaruhi pengambilan kebijakan negara (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022). Keputusan Indonesia yang dinilai menjauhkansanksi CAATSA merupakan bentuk pertimbangan teknis daripada pertimbangan politik. Pertimbangan teknis adalah perihal anggaran, spesifikasi teknologi, kesesuaian terhadap postur pertahanan, dan antisipasi risiko kerugian ekonomi. Pertimbangan terkait dampak keuntungan dan kerugian dalam menekan kerja sama pembelian alutsista menunjukkan bahwa Indonesia menentukan kebijakan sesuai dengan perhitungan rasional guna melindungi kepentingan nasional.

Sementara itu, potensi penggunaan kekuatan bersenjata berada dalam tingkatan perseteruan (*hostility*) yang tinggi dalam politik internasional. Mengingat kekuatan militer merupakan

sumber daya nasional yang dimiliki negara sebagai upaya *deterrence*, pertahanan dan perang, maka penggunaan kekuatan bersenjata bisa jadi diposisikan sebagai kemampuan negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain secara koersif (Sinikiem, 2021). Potensi penggunaan kekuatan bersenjata oleh aktor negara tertentu diukur melalui penilaian yang bersifat struktural, yakni terkait kemampuan/kekuatan militer negara sebagai alat mempengaruhi perilaku negara lain melalui ancaman dan tindakan koersif; dan penilaian relasional terkait tingkat ancaman yang terbentuk dari hubungan antar negara.

Pada konteks hubungan pertahanan Indonesia - Amerika Serikat, dinamika hubungan kedua negara tidak mencerminkan adanya penggunaan kekuatan bersenjata yang ditunjukkan oleh satu pihak untuk menekan pihak lainnya. Secara struktural, militer Amerika Serikat menunjukkan kekuatan yang superior dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia. Akan tetapi superioritas kekuatan militer Amerika Serikat tidak dijadikan sebagai alat tindakan koersif terhadap Indonesia. Faktor relasional juga menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat tidak memposisikan satu sama lain sebagai ancaman. Terlebih, tidak ada penilaian situasi krisis yang menjustifikasi mekanisme penggunaan

kekuatan bersenjata dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Meskipun memiliki hubungan kerja sama yang mengedepankan praktik diplomasi secara damai, terdapat tantangan yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan pertama mengacu pada pemberlakuan sanksi oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Leahy terhadap satuan unit KOPASSUS yang hingga memasuki tahun 2020 tidak menunjukkan adanya perubahan kebijakan terkait pencabutan sanksi tersebut (Blank, 2021). Sementara permasalahan kedua menitikberatkan pada sengketa hukum (*legal dispute*) antara kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia maupun Amerika Serikat terkait transparansi daftar awak kapal. Posisi Amerika Serikat yang mempertahankan kebijakan untuk merahasiakan daftar awak kapal perang angkatan laut dinilai Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah (Blank, 2021).

Sejumlah fenomena kontra produktif yang menjadi tantangan bagi hubungan pertahanan kedua negara tidak secara potensial mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata. Mengingat paradigma kontemporer yang memosisikan kontrol terhadap penggunaan kekuatan bersenjata sebagai upaya terakhir (*last resort*),

maka penekanan upaya diplomasi adalah langkah utama (Sinikiem, 2021). Selama langkah diplomasi tetap berjalan dalam hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat, maka kecil adanya potensi penggunaan kekuatan bersenjata yang dipertimbangkan dalam mengatasi tantangan. Penilaian terhadap tantangan dan potensi tindakan koersif antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak mengindikasikan penggunaan unsur *hard power* dari konsep *Military Statecraft* sebagai kondisi yang secara signifikan mendasari hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat.

#### ***Incentive Military Statecraft dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat***

Berangkat dari asumsi bahwa hubungan kerja sama pertahanan tidak terjadi secara sukarela, maka setiap negara mengatur strategi untuk mendatangkan keuntungan bagi pembangunan kapabilitas pertahanan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan nasional. Pada dasarnya kerja sama pertahanan tetap memperhitungkan daya tawar dari masing-masing negara yang terlibat dalam suatu kerja sama strategis. Posisi dan daya tawar mencerminkan interelasi di antara pihak yang terlibat dalam kerja sama pertahanan dengan memperhitungkan keuntungan strategis. *Military Statecraft* dalam hal ini

mengakomodasi bentuk hubungan yang dilandasi oleh daya tawar dan/atau kemampuan ekonomi bagi kebutuhan pertahanan negara. Variabel ini menggambarkan daya tawar dan kemampuan ekonomi Indonesia sebagai unsur *economic power* melalui analisis terhadap dua indikator, yakni jaminan keamanan dan pengalihan alutsista.

Jaminan keamanan atau *security guarantee* merupakan upaya negara kekuatan militer global dalam memberikan perlindungan kepada negara lain untuk mencegah ancaman konvensional, seperti ancaman agresi militer hingga ancaman penggunaan nuklir. Penekanan *security guarantee* berada pada dependensi keamanan sehingga dalam konteks kerja sama pertahanan, jaminan keamanan secara efektif berlaku bagi negara-negara yang diposisikan sebagai sekutu atau mitra (Tertrais, 2011). *Security guarantee* memiliki dua tujuan utama, yakni; meniadakan segala bentuk tindakan yang berpotensi mendatangkan reaksi ofensif dari pihak oponent; dan memberikan jaminan dan perlindungan bagi pihak sekutu agar motivasi proliferasi nuklir berkurang (Bleek & Lorber, 2014).

Amerika Serikat menempatkan postur kekuatan nuklirnya sebagai pelindung dan penjamin keamanan bagi negara-negara sekutu dan mitra. Sementara Indonesia tidak

memposisikan kekuatan nuklir sebagai bagian pembentukan postur pertahanannya. Melalui kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia berkomitmen pada implementasi *Non-Proliferation Treaty* (NPT) sebagai upaya mencegah proliferasi nuklir (Sipahutar, 2020). Selain itu, Indonesia lebih menekankan peran sentral ASEAN dalam menegakkan traktat *Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) sebagai bentuk jaminan dari perspektif keamanan negatif di kawasan (Pacheco Pardo & Leveringhaus, 2022).

Hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat secara kontekstual mengandung kemitraan strategis yang menekankan aspek keamanan. Akan tetapi hubungan tersebut tidak menunjukkan kepentingan untuk beraliansi, sehingga kebutuhan akan *security guarantee* untuk mencegah tindakan ofensif bukan hal relevan. Indonesia tidak berposisi sebagai sekutu yang berada dalam payung perlindungan Amerika Serikat terkait ancaman tradisional agresi militer maupun nuklir. Sebagai negara pelopor gerakan non-blok, Indonesia tidak memiliki dependensi atau ketergantungan akan jaminan keamanan dari negara pertahanan kuat seperti Amerika Serikat. Posisi tawar Indonesia untuk menjadi negara netral diperkuat dengan adanya prinsip dasar politik

bebas aktif, non-blok, dan cara pandang Indonesia dalam menghadapi fenomena global (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022).

Indonesia yang telah lama mempertahankan posisi sebagai negara non-blok konsisten untuk absen dari pakta pertahanan tertentu, termasuk aliansi pimpinan Amerika Serikat. Jaminan keamanan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja sama pertahanan Indonesia dengan Amerika Serikat. Netralitas mendorong Indonesia untuk mengambil pendekatan *balancing* dan mendorong peran sentralitas ASEAN sebagai organisasi regional yang juga berposisi strategis bagi kepentingan Amerika Serikat di kawasan.

Indikator kedua variabel ini adalah menyangkut pengalihan alutsista yang menggambarkan upaya kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembangunan fisik MEF. Tren menunjukkan bahwa Amerika Serikat menempati urutan pertama sebagai negara eksportir alutsista kepada Indonesia dengan nilai agregat 179 juta TIV (Lihat Tabel 1). TIV atau *trend-indicator values* merupakan metode pengukuran terhadap tren alih persenjataan antarnegara tertentu dengan periode waktu tertentu yang dikembangkan lembaga riset *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) sebagai refleksi nilai indeks

kapabilitas militer, bukan sebagai refleksi nilai pembayaran riil (Hottom, 2012).

**Tabel 1. Nilai Ekspor Alutsista ke Indonesia Tahun 2020-2021 (Juta TIV)**

<b>Eksportir</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Total</b>
<b>AS</b>	88	91	179
<b>Korea Selatan</b>	6	151	157
<b>Perancis</b>	48	23	71
<b>Swiss</b>	61	-	61

Sumber: SIPRI Arms Transfer Database (2022)

Melalui data tersebut, posisi Amerika Serikat yang menempati urutan atas eksportir alutsista/persenjataan bagi kebutuhan pembangunan MEF Indonesia mencerminkan kerja sama pertahanan aspek *capacity building* mengalami peningkatan. Indonesia dan Amerika Serikat secara potensial memiliki nilai kontrak sebesar 1,88 Juta USD sebagai bentuk penjual *government-to-government* di bawah program *Foreign Military Sales* (FMS), ditambah dengan bantuan hibah dari program *Foreign Military Financing* (FMF) sebesar 14 Juta USD yang diterima Indonesia pada tahun 2020 (U.S. Department of State, 2021).

Pembinaan hubungan kerja sama dengan Amerika Serikat menempatkan Indonesia sebagai negara mitra pertahanan yang memiliki akses terbuka dan peluang dalam mendatangkan sejumlah alutsista bagi peningkatan

kapabilitas pertahanan. Meskipun demikian, daya tawar atau kemampuan anggaran sebagai bentuk unsur *economic power* menjadi pertimbangan dalam menilai prospek pengalihan alutsista dari program FMS dan FMF terhadap pembangunan aspek fisik MEF.

Dalam rentang waktu 2020-2021, kerja sama pertahanan Indonesia dan Selebihnya merupakan perengkapan alutsista berupa suku cadang, mesin, senjata misil dan sistem radar yang penting untuk menopang sistem pertahanan matra udara dan matra laut.

Adapun kategori alutsista yang diterima Indonesia pada tahun 2020 dalam bentuk hibah melalui program FMF dari Amerika Serikat tercatat ada 14 unit pesawat nirawak (UAV) dan tiga unit Bell 412 *Helicopter Equipment* yang dikirimkan secara bertahap (Komisi I

DPR RI, 2020). Kemudian di tahun 2021, TNI AL kembali menerima delapan unit pesawat nirawak *ScanEagle 2* UAV dihibahkan oleh pemerintah AS melalui *Maritime Security Initiative*, sebuah program *capacity building* yang diperuntukkan bagi angkatan laut negara-negara Asia Tenggara (Dominguez, 2021). Hibah alutsista tersebut diperuntukkan meningkatkan kemampuan *Intelligence, Surveillance, Reconnaissance* (ISR) TNI AL. Amerika Serikat telah mengeksekusi pengalihan alutsista baik berupa satuan unit maupun suku cadang (SIPRI, 2022). Sejumlah alutsista yang diterima Indonesia dalam bentuk satuan unit di antaranya; helikopter Bell-412 dan helikopter ringan Bell-505 *Jet Ranger*, serta pesawat nirawak UAV *ScanEagle* (Lihat Tabel 2).

Tabel 2. *Pengalihan Alutsista Utama dari Amerika Serikat ke Indonesia Tahun 2020-2021*

<i>Recipient (R)/ Supplier (S)</i>	<i>Jumlah Order</i>	<i>Nama Senjata</i>	<i>Deskripsi Senjata</i>	<i>Tahun order</i>	<i>Tahun Pengiriman</i>	<i>Jumlah dikirim</i>
R: Indonesia S: Amerika Serikat	18	C13	Mesin diesel	2019	-	1
	6	F404	Turbofan	-	2021	1
	76	CT7	Turboprop	1990	1993- 2019	54
	2	HELTRAS	ASW Sonar	2014	2019-2020	2
	160	F414	Turbofan	2016	-	-
	20	6V-53	Mesin Diesel	2017	2020	20
	16	AAQ-33 Sniper	Sistem EO pesawat	2017	2019-2021	12
	36	AIM-120C AMRAAM	BVRAAM	2017	2019-2020	36
	200	AIM-120C AMRAAM	BVRAAM	2017	2020-2021	200
	2	MPQ-64 Sentinel	Radar Pencarian Udara	2017	2020-2021	2
	9	Bell-412	Helikopter	2018	2020-2021	5
	6	ScanEagle	UAV	2018	2021	3
	5	C-130J Hercules	Pesawat Angkut	2019	-	-
	23	ISC	Mesin Diesel	2019	2021	5
8	ScanEagle	UAV	2019	-	-	
4	Bell-505 Jet Ranger	Helikopter ringan	2020	2021	2	

Sumber: SIPRI Trade Register (2022)

Tidak semua bentuk kerja sama pertahanan melalui program FMS terealisasi dalam rentang waktu tahun 2020-2021. Permasalahan akuisisi tersebut terhambat pada penyesuaian terhadap anggaran belanja pertahanan Indonesia. Di sisi lain, proses pengajuan proposal penjualan alutsista melalui program FMS yang disepakati Indonesia dan Amerika Serikat membutuhkan konfirmasi Kongres Amerika Serikat (Komisi I DPR RI, 2020). Adapun beberapa potensi pembelian alutsista yang telah diajukan dan diujikan dalam kerja sama pertahanan kedua negara

diantaranya adalah; helikopter MV-22 Blok C *Osprey* dan sejumlah komponen sistem radar (*Defense Security Cooperation Agency*, 2020); pesawat tempur F-15 dan F-18 guna regenerasi armada tempur F-16 TNI AU (CNN Indonesia, 2020); dan drone tempur MQ-1C *Gray Eagle* yang sedang dalam pertimbangan oleh pemerintah Amerika Serikat (Mcleary & Hudson, 2021).

Mengingat program FMS bersifat *government-to-government*, maka diplomasi pertahanan yang dilakukan pemerintah Indonesia menjadi kunci penting dalam mendukung pembelian alutsista. Secara garis besar, kerja sama

pertahanan strategis dengan Amerika Serikat memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk menargetkan pembelian alutsista melalui program FMS. Meskipun terdapat penilaian yang mengandung unsur kontra produktif terhadap hubungan kerja sama, tidak ada ketentuan yang memberatkan Indonesia untuk bisa mengajukan pembelian alutsista kepada pemerintah Amerika Serikat melalui program FMS. Dalam hal ini, tidak ada lobi secara khusus yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses ke program FMS (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022).

### ***Co-optive Military Statecraft* dalam Kerja Sama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat**

Upaya kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat ditandai dengan serangkaian aktivitas kooperatif yang melibatkan institusi pertahanan dan militer kedua negara. Variabel ini menekankan esensi diplomasi pertahanan sebagai upaya membina hubungan kedua negara di bidang pertahanan. Indonesia sebagai mitra strategis pertahanan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan positif yang terbentuk dari hubungan pertahanan kedua negara sesuai dengan logika *shaping*. Terminologi *shaping* digunakan untuk menjelaskan kegunaan non-

kekerasan militer dalam mencapai kepentingan negara melalui tindakan membangun relasi dengan negara lain (Wolfley, 2021). Adapun beberapa agenda kerja sama pertahanan Indonesia - Amerika Serikat yang menggabungkan konteks *trust building* dan *capacity building* diidentifikasi melalui kategorisasi di bawah ini.

### **Pendidikan dan Pelatihan**

Kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan erat dengan pembangunan MEF sebab berperan dalam pengembangan kualitas personel/ SDM serta penguatan institusi yang berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan. Pendidikan dan pelatihan termasuk agenda kerja sama prioritas yang berlangsung secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara mitra pertahanan yang mengirimkan personel militer untuk mengikuti pendidikan dan pertukaran perwira dalam jumlah besar.

Sejumlah program yang mewadahi agenda kerja sama ini antara lain; *International Military and Education Training* (IMET); *Combating Terrorism and Irregular Warfare Fellowship Program* (CTIWFP), *Maritime Security Initiative* (MSI), dan pelatihan khusus mengoperasikan alutsista FMS dan FMF (U.S. Department of State, 2022). Selain itu juga diperluas kerja sama dalam terkait keamanan siber (Achyar,

wawancara, 25 Mei 2022) dan penjabaran terkait *Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive* (CBRNE) sebagai bentuk pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan kimia (Ditjen Strahan Kemhan, 2021).

Tabel 3. **Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Amerika Serikat 2020-2021**

Program	2020		2021	
	Jumlah peserta	Jumlah kursus	Jumlah peserta	Jumlah kursus
ALP	1	1	0	0
CTIWFP	11	12	16	13
DOHS/USCG	0	0	2	1
FMF	93	97	116	88
FMS	103	26	13	16
IMET-1	43	56	24	29
IMET-2	0	0	1	1
MSI	173	7	16	13
PKO	19	5	0	0
Regional Centers	186	34	0	0
Section 333	12	10	23	20
Total	641	242	211	175

Sumber: *Foreign Military Training Report to US Congress, FY 2020-2021*

### Latihan Bersama Militer

Kegiatan latihan militer bersama atau *joint exercise* menjadi manifestasi kerja sama pertahanan yang berimplikasi langsung dalam pengembangan ranah kemiliteran. Latihan bersama biasanya diselenggarakan sesuai spesifikasi matra, baik darat, laut, dan udara. Penyesuaian spesifik memungkinkan

personel militer Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengembangkan kemampuan tempur atau taktis sesuai dengan kebutuhan masing-masing matra. Agenda latihan bersama tidak hanya merefleksikan upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan, melainkan juga penyatuan visi dan misi dalam menghadapi potensi ancaman dari sudut pandang Indonesia dan Amerika Serikat.

Salah satu latihan bersama antara TNI dan militer Amerika Serikat yang digelar rutin setiap tahun adalah *Garuda Shield* dengan rangkaian aktivitas pembekalan dan pelatihan taktis, penguatan institusi, dan pengadaan *workshop* akademik bagi personel (*U.S. Embassy Jakarta, 2021*). Selain itu, di tingkat matra laut latihan rutin *Cooperation Afloat Readiness and Training* (CARAT) mengakomodasi sejumlah aktivitas peningkatan kapabilitas seperti kemampuan menyelam, medis, penerbangan dan berbagi informasi, serta membangun kesadaran maritim (*U.S. Embassy Jakarta, 2021*). Adapun serangkaian latihan bersama militer Indonesia dan Amerika Serikat yang diselenggarakan dalam rentang tahun 2020-2021 dapat diidentifikasi melalui tabel 4 berikut.

Tabel 4. **Latihan Bersama (Latma) Militer Indonesia dan Amerika Serikat Tahun 2020-**

Kode Latihan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Matra	Sumber
JCET Arrow Iron	Maret 2020	Medan	Udara	TNI AU, 2020
Garuda Shield-14	September 2020	Sentul, Bogor	Darat	Kostrad, 2020
PLATEX-A	November 2020	Hawaii	Darat	Kostrad, 2020
JRTC Rotation	Desember 2020	Fort Polk, Louisiana	Darat	TNI AD, 2020
Reconex 21-II	Juni 2021	Banyuwangi	Laut, Marinir	Puspen TNI, 2021
AMX Cope West	Juni 2021	Pekanbaru	Udara	TNI AU, 2021
Garuda Airborne	Juli 2021	Fort Bragg, North Carolina	Darat	TNI AD, 2021
Garuda Shield-15	Agustus 2021	Baturaja	Darat	Puspomad, 2021
Bomber Exercise	September 2021	Madiun, Balikpapan, Makassar	Udara	Puspen TNI, 2021
CARAT	November 2021	Surabaya	Laut	Koarmada II, 2021

## 2021

Sumber: Diolah Peneliti (2022)

### Kunjungan Kenegaraan dan Dialog

Keberadaan diplomat militer menjadi komponen penting bagi keberlangsungan kerja sama pertahanan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat. Perwakilan negara di bidang pertahanan (*military to military*) berperan dalam membangun komunikasi guna memperluas aspek kerja sama melalui agenda pertemuan dan dialog. Dalam praktiknya, agenda pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat diselenggarakan dalam tingkat kementerian hingga institusi militer. Kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Washington D.C.

pada Oktober 2020 menjadi agenda penting dalam memperkuat kerja sama. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper tersebut mendiskusikan terkait keamanan regional, agenda prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan untuk peningkatan kapabilitas pertahanan (Kementerian Pertahanan, 2020).

Komunikasi pertahanan kemudian ditindaklanjuti dalam kunjungan Pejabat Menhan Amerika Serikat Christopher Miller ke Jakarta pada Desember 2020 yang mendiskusikan kepentingan terkait keamanan maritim, pengadaan alutsista,

dan pendidikan militer. Sementara pada November 2021, dilaksanakan pertemuan Menhan Prabowo dengan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin di sela forum *The Manama Dialogue* yang digelar di Bahrain (Kementerian Pertahanan, 2021). Selain itu, Indonesia dan AS juga menyelenggarakan forum dialog tahunan untuk membahas pertahanan.

Forum *Indonesia-United States Security Dialogue* (IUSSD) menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan MEF. Forum IUSSD ke-18 dan ke-19 pada tahun 2020-2021 diselenggarakan secara langsung di Pentagon, Washington D.C. (Achyar, wawancara, 25 Mei 2022). Forum tersebut menghadirkan sejumlah inisiatif baru yang memperkuat kemitraan strategis pertahanan kedua negara, antara lain terkait perluasan lingkup latihan militer bersama, kolaborasi dalam domain maritim, keamanan siber hingga keamanan non-konvensional perubahan iklim (*U.S. Department of Defense*, 2021).

Agenda pertemuan *military-to-military* juga aktif dilakukan di tingkat matra. Pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia dan AS pada Desember 2020 di Jakarta membawa misi peningkatan kerja sama juga pertukaran budaya yang ditunjukkan melalui penampilan berbagai macam pakaian adat dan lagu daerah Indonesia (Hermawan, 2020). Pada kesempatan lain TNI AL dan

Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengadakan kegiatan *Staff Talks* untuk membahas persiapan sejumlah latihan bersama tahun 2022 mendatang. Kegiatan tersebut juga membahas sejumlah area kerja sama seperti pendidikan, operasi khusus, bidang logistik, hukum dan pembinaan mental (Dispen TNI AL, 2021).

### **Pembangunan Infrastruktur dan Industri Pertahanan**

Selaras dengan pembangunan MEF, pembangunan infrastruktur, sarana-prasarana, dan industri pertahanan berperan penting dalam mendorong kemandirian Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pertahanan. Mengingat terbatasnya penguasaan teknologi, Indonesia memerlukan bantuan teknologi dari negara lain yang mampu menunjang industri pertahanan dalam negeri. Terkait agenda industri pertahanan, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat masih belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kedua negara belum memiliki mekanisme alih teknologi untuk pembangunan industri pertahanan dalam negeri Indonesia dikarenakan faktor kebijakan Amerika Serikat yang membatasi alih teknologi pertahanan ke negara lain. Sistem kontrol ekspor persenjataan yang ketat hanya memungkinkan Amerika Serikat berbagi teknologi sensitif dengan negara sekutu (Chairil, 2020).

Sejauh ini Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati pembangunan

fasilitas Pusat Pelatihan Maritim (*Maritime Training Center*) di Batam. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan *US Coast Guard*. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional BAKAMLA dalam hal meningkatkan kualitas SDM dari para personel. Dipastikan tidak ada penempatan pasukan Amerika Serikat dalam fasilitas tersebut (*Indo-Pacific Defense Forum*, 2021). Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam penjagaan keamanan dan perdamaian kawasan.

### **Bantuan Kemanusiaan dan Tanggap Bencana/HADR**

Misi kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan bagian integral dari area kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda ini termasuk upaya memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer berupa bencana alam dan sosial secara adaptif. Pada masa pandemi COVID-19, keterlibatan militer dalam logistik dan pengawasan menjadi arah diplomasi pertahanan. Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat kesehatan berupa 500 unit ventilator dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk persahabatan dan solidaritas yang terjalin dalam hubungan bilateral kedua negara (Kementerian Pertahanan, 2020). Selain ventilator, Indonesia juga menerima

tiga unit mesin RT-PCR yang diperuntukkan untuk sejumlah rumah sakit TNI.

Bentuk kerja sama HADR juga ditunjukkan pada saat insiden tenggelamnya kapal selam *KRI Nanggala-402* di perairan Bali pada April 2021 silam. Indonesia mengundang sejumlah negara sahabat untuk membantu pencarian kapal selam yang hilang termasuk Amerika Serikat. Permintaan tersebut ditanggapi Departemen Pertahanan dan militer Amerika Serikat dengan mengirimkan pesawat P-8 *Poseidon* untuk membantu proses pencarian berupa pesawat pengintai (Christiastuti, 2020). Dalam rangka mitigasi bencana, kedua negara mengadakan latihan bertajuk 'GEMA BHAKTI' pada tingkat Mabes TNI dan kegiatan *Pacific Airlift Rally* pada tingkat matra udara sebagai upaya kerja sama dalam meningkatkan kemampuan serta kesiapan mitigasi bencana (*U.S. Embassy Jakarta*, 2021).

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kepentingan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan berdasarkan Rencana Strategis pemenuhan target kekuatan pokok minimum atau MEF mendorong perluasan serta peningkatan pada area kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat. Upaya kerja sama pertahanan kedua negara secara garis besar menekankan dua (2) konteks utama, yaitu membangun

kapabilitas (*capacity building*) dan membangun kepercayaan (*trust building*). Pembangunan MEF aspek fisik menitikberatkan pada pembangunan materiil yang berkaitan dengan penambahan dan modernisasi alutsista, maka kerja sama pengadaan dan pembelian alutsista melalui program FMS dan FMF berkontribusi bagi penguatan postur pertahanan Indonesia. Namun, keterbatasan anggaran pertahanan menjadi salah satu penyebab terhambatnya akuisisi sejumlah alutsista vital bagi peningkatan target MEF.

Sebagai variabel integral konsep *Military Statecraft*, unsur *hard power* tidak diaplikasikan untuk menganalisis secara langsung pelaksanaan kerja sama, melainkan terbatas pada penilaian potensi tindakan koersif yang bersifat kontra produktif terhadap agenda kerja sama. Unsur *economic power* menjadi acuan penting dalam memperhitungkan interelasi Indonesia dengan Amerika Serikat sebagai mitra pertahanan.

Sementara untuk upaya membangun kepercayaan, diplomasi pertahanan yang mengandung unsur *co-optive power* mencerminkan prospek kerja sama pertahanan antara kedua negara. Diplomasi pertahanan menjadi langkah awal bagi Indonesia dan Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kerja sama terkait pembangunan fisik MEF juga pengembangan kualitas SDM yang

menjadi bagian dari kapabilitas pertahanan

Hasil penelitian ini direkomendasikan agar dapat dikembangkan untuk keperluan penelitian selanjutnya. Mengingat tema penelitian ini masih relevan untuk mengkaji pencapaian final target MEF tahap III yang diproyeksi akan selesai pada tahun 2024.

### Daftar Pustaka

- Achyar, M. (2022). "Diplomasi Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat tahun 2020- 2021". Hasil Wawancara: 25 Mei 2022, Kementerian Pertahanan.
- Ahyar, H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March). Pustaka Ilmu.
- Blank, J. (2021). *Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Indonesia*. In *Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific: Indonesia*. RAND Cooperation.
- Bleek, P. C., & Lorber, E. B. (2014). *Security Guarantees and Allied Nuclear Proliferation*. *Journal of Conflict Resolution*, 58(3), 429–454.
- Chairil, T. (2020). *Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat idak akan berdampak signifikan pada industri pertahanan Indonesia*. The Conversation. <https://theconversation.com/kunjungan-prabowo-subianto-ke-amerika-serikat-tidak-akan-berdampak-signifikan-pada-industri-pertahanan-indonesia-149747>
- Christiastuti, N. (2020). *AS Kirim Pesawat Militer Bantu Indonesia Cari KRI Nanggala-402*. Detik.Com. <https://news.detik.com/internasional/>

- [d-5543147/as-kirim-pesawat-militer-bantu-indonesia-cari-kri-nanggala-402/2](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211093640-106-580803/as-setuju-jual-jet-tempur-f-15-dan-f-18-ke-indonesia)
- CNN Indonesia. (2020). *AS Setuju Jual Jet Tempur F-15 dan F-18 ke Indonesia*. cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211093640-106-580803/as-setuju-jual-jet-tempur-f-15-dan-f-18-ke-indonesia>
- Crystal, S. (2015). Coercive Diplomacy : A Theoretical and Practical Evaluation. *Glendon Journal of International Studies*, 8(1), 1–29. <http://qjis.journals.yorku.ca/index.php/qjis/article/view/38941/3630>
- Defense Security Cooperation Agency. (2020). *INDONESIA – MV-22BLOCK C OSPREY AIRCRAFT*. DCSA. <https://www.dsca.mil/press-media/major-armssales/indonesia-mv-22-block-c-osprey-aircraft>
- Ditjen Strahan Kemhan. (2021). Rapat Pembahasan 5-Year CBRN Program dan 5- Year CBRN MEDCAP Program.
- Dominguez, G. (2021). *Indonesian Navy begins receiving ScanEagle UAVs from US*. Janes. <https://www.janes.com/defence-news/news-detail/indonesian-navy-begins-receiving-scaneagle-uavs-from-us>
- Fitri, A., & Sanur, D. (2019). Peran DPR RI Terkait Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF). *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(22), 25–30.
- Hermawan, N. (2020). *Kunjungan Chief of Staff of the United States Army, General James C. McConville ke Mabesad*. 60" TNI AD. <https://tniad.mil.id/kunjungan-chief-staff-united-states-army-general-james/>
- Hottom, P. (2012). *Measuring International Arms Transfers*. SIPRI Fact Sheet, 1– 2.
- Indo-Pacific Defense Forum. (2021). *U.S., Indonesia building maritime training base in Batam*. Ipdefenseforum.Com. <https://ipdefenseforum.com/2021/07/u-s-indonesia-building-maritime-training-base-in-batam/>
- Kementerian Pertahanan. (2012). *Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama*. *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia*, 19, 4– 35. <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/Permenhan-Nomor-19-Tahun-2012-Lampiran-1.pdf>
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Kemhan RI.
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Menhan RI Menyambut kedatangan Alat Ventilator Dari Kedubes Amerika Serikat*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2020/08/30/menhan-ri-menyambut-kedatangan-alat-ventilator-dari-kedubes-amerika-serikat.html>
- Kementerian Pertahanan. (2020). *Pernyataan Bersama Terkait Pertemuan Menteri Pertahanan Dr. Mark T. Esper dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2020/10/16/ Pernyataan-bersama-terkait-pertemuan-menteri-pertahanan-dr-mark-t-esper-dengan-menteripertahanan-an-prabowo-subianto.html>
- Kementerian Pertahanan. (2021). *Menhan Prabowo dan Menhan AS Lloyd Austin Bicarakan Kerja Sama*

- Pertahanan*. Kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2021/11/21/menhan-prabowo-dan-menhan-as-loyd-austinbicarakan-kerja-sama-pertahanan.html>
- Komisi I DPR RI. (2020). *Komisi I Setujui Pemerintah Terima Hibah Alutsista AS*. dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27910/t/Komisi+I+Setujui+Pemerintah+Terima+Hibah+Alutsista+AS>
- Mcleary, P., & Hudson, L. (2021). *Biden administration wrestles with selling armed drones to Indonesia*. Politico. <https://www.politico.com/news/2021/11/11/biden-administration-armed-drones-indonesia-520888>
- Pacheco Pardo, R., & Leveringhaus, N. (2022). Security and defence in the Indo-Pacific: What is at stake for the EU and its strategy? European Parliament.
- Saballa, J. (2021). *Indonesia Backs Out of Sukhoi Deal for US, French Warplanes*. The Defense Post. <https://www.thedefensepost.com/2021/12/23/indonesiasukhoi-us-french-planes/>
- Sinikiem, A. (2021). Military Power and the Use of Force in International Politics: A Realist Perspective. *IJCSIRD*, 7(1), 97–106.
- Sipahutar, T. A. (2020). Indonesia 's Foreign Policy Towards The Nuclear Nonproliferation Treaty ( NPT ). *IJCSIRD*, 10(9), 10–17.
- SIPRI. (2022). *Trade Register 2020-2021: Transfer of Major Weapons from U.S. to Indonesia*. Diakses pada 04 April 2022.
- SIPRI. (2022). Arms Transfer Database 2020-2021. Diakses pada 13 April 2022.
- Tertrais, B. (2011). Security Guarantees and Nuclear Nonproliferation. *Fondation Pour La Recherche Strategique*, 1949.
- U.S. Department of Defense. (2022). *Foreign Military Sales (FMS)*. Defense Security Cooperation Agency. <https://www.dsca.mil/foreign-military-sales-fms>
- U.S. Department of Defense. (2021). *No Title Readout of Indonesia – United States Security Dialogue 2021*. Press Releases. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2852539/readout-of-indonesia-united-states-security-dialogue-2021/>
- U.S. Department of State. (2021). *U.S. Security Cooperation with Indonesia*. Bureau of Political-Military Affairs. <https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-indonesia/>
- U.S. Embassy Jakarta. (2021). *U.S.-Indonesia “GEMA BHAKTI” Crisis Response Exercise Concludes in Jakarta*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-indonesia-gema-bhakti-crisis-response-exercise-concludes-in-jakarta/>
- U.S. Embassy Jakarta . (2021). *U.S., Indonesia Commence Bilateral Maritime Exercise CARAT Indonesia*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-indonesia-commence-bilateral-maritime-exercise-carat-indonesia/>
- U.S. Embassy Jakarta. (2021). *U.S. and Indonesia Strengthen Partnership with Garuda Shield 2021 Military Exercise*. Press Releases. <https://id.usembassy.gov/u-s-and-indonesia-strengthen-partnership-with-garuda-shield-2021-military-exercise/>
- Wezeman, S. T. (2019). Arms Flows to

South East Asia. *Stockholm International Peace Research Institute*, 1(1), 61.

Winger, G. (2014). *The Velvet Gauntlet : A Theory of Defense Diplomacy*. *IWM*, 33, 10.

Wolfley, K. J. (2019). United States Military Academy USMA Digital Commons Military Statecraft and the Use of Multinational Exercises in World Politics “ Military Statecraft and the Use of Multinational Exercises in World Politics .” *International Studies Association Annual Convention*, 4.

Wolfley, K. J. (2021). *Military Statecraft and the Rise of Shaping in World Politics*. Rowman & Littlefield.

Zahara, E. L., & Arjun Rizky, M. N. (2020). Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI*, No. 04/arc, 1–6.

Multinational Exercises in World Politics .” *International Studies Association Annual Convention*, 4.

Wolfley, K. J. (2021). *Military Statecraft and the Rise of Shaping in World Politics*. Rowman & Littlefield.

Zahara, E. L., & Arjun Rizky, M. N. (2020). Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jendral DPR RI*, No. 04/arc, 1–6.